



ANALISIS KOMPARATIF SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN INDONESIA DAN JEPANG SERTA REFLEKSI KRITIS TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

¹Lily Farida Rahman & ²Elly Nurlia

¹ Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang
6670240111@student.untirta.ac.id

² Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang
ellynurlia@untirta.ac.id

Accepted: September 2026; Published: September 2026; Available online: September 2026

ABSTRAK

Perbedaan stabilitas dan efektivitas sistem politik di kawasan Asia menunjukkan bahwa desain kelembagaan saja tidak cukup menjelaskan kinerja pemerintahan, sehingga diperlukan analisis komparatif yang lebih kontekstual. Penelitian ini bertujuan membandingkan sistem politik dan pemerintahan Indonesia dan Jepang, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi dalam dimensi politik, ekonomi, budaya, dan sejarah, serta memberikan refleksi kritis terhadap Indonesia. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan pendekatan analitis berdasarkan teori sistem politik oleh David Easton, yang mencakup *input*, *proses*, *output*, dan *feedback*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam hal legitimasi demokrasi dan keterbukaan terhadap partisipasi politik melalui mekanisme pemilihan langsung, namun masih menghadapi masalah efektivitas kebijakan akibat fragmentasi sistem multipartai dan dinamika kompromi politik. Di sisi lain, Jepang secara politik lebih stabil dan konsisten dalam kebijakannya yang didukung oleh konsolidasi kelembagaan, dominasi partai, dan budaya politik yang berorientasi jangka panjang. Temuan ini menyoroti pentingnya kapasitas kelembagaan dan budaya politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola di Indonesia.

Key Word: Perbandingan Politik, Sistem Politik, Indonesia, Jepang

ABSTRACT

Differences in the stability and effectiveness of political systems across Asia indicate that institutional design alone is insufficient to explain government performance, necessitating a more contextual comparative analysis. This study aims to compare the political and governmental systems of Indonesia and Japan, identify their similarities and differences, analyze the influencing factors across political, economic, cultural, and historical dimensions,

and offer a critical reflection on Indonesia. The method used is a literature review with an analytical approach based on David Easton's political system theory, which encompasses inputs, processes, outputs, and feedback. The results show that Indonesia excels in terms of democratic legitimacy and openness to political participation through direct election mechanisms, yet it still faces challenges regarding policy effectiveness due to the fragmentation of its multiparty system and the dynamics of political compromise. On the other hand, Japan is politically more stable and consistent in its policies, supported by institutional consolidation, party dominance, and a long-term-oriented political culture. These findings highlight the importance of institutional capacity and political culture in improving the quality of governance in Indonesia

Key Word: *Comparative Politics, Political Systems, Indonesia, Japan*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem politik di Asia ditandai oleh dinamika yang kompleks, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Indonesia dan Jepang merupakan objek studi yang sangat menarik karena keduanya mewakili dua model yang berbeda, yaitu sistem presidensial di Indonesia dan sistem parlementer dalam kerangka monarki konstitusional di Jepang (Pelu et al., 2022). Perbedaan tersebut terlihat jelas tidak hanya pada struktur formal, tetapi juga pada praktik politik dan efektivitas tata kelola. Jepang dikenal karena stabilitas politik dan konsistensi kebijakannya, yang didukung oleh birokrasi profesional dan pengalaman historis pasca Perang Dunia II (Lestari, 2025). Sebaliknya, Indonesia memiliki dinamika yang lebih kompleks karena fragmentasi politik, keragaman sosial, dan inkonsistensi kebijakan (Karisma & Aminullah, 2026). Untuk memahami perbedaan-perbedaan

ini, penelitian ini mengadopsi teori sistem politik David Easton yang menekankan hubungan antara input, proses, output, dan umpan balik dalam suatu sistem politik (Easton, 1965).

Meskipun demikian, terdapat pula kesamaan mendasar antara kedua negara tersebut, seperti bentuk negara kesatuan serta keberadaan lembaga perwakilan (Pelu et.al, 2022). Selain itu, Indonesia dan Jepang juga berupaya meningkatkan kualitas tata kelola melalui reformasi birokrasi dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik (Sabrina et.al., 2024). Namun, perbedaan dalam konteks sejarah, budaya politik, dan kapasitas kelembagaan masih menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas sistem pemerintahan di masing-masing negara (Wahyudin et al., 2019)

Kajian-kajian terdahulu, meskipun memberikan kontribusi penting, masih memiliki keterbatasan cakupan. Pelu et al. (2022) mengkaji perbandingan secara normatif-yuridis yang

berfokus pada aspek konstitusi, bentuk negara, dan lembaga perwakilan, tanpa menggunakan kerangka teori sistem politik maupun mengintegrasikan faktor ekonomi, budaya, dan sejarah secara komprehensif, sementara Sabrina et al. (2024) melakukan analisis deskriptif-komparatif yang mencakup struktur pemerintahan, kebijakan politik, ekonomi, dan budaya, namun pendekatannya bersifat deskriptif tanpa kerangka analitis teoritis yang sistematis. Di sisi lain, Karisma & Aminullah (2026) membatasi kajiannya pada dimensi administrasi publik dan birokrasi modern, sehingga tidak mencakup analisis sistem politik secara menyeluruh. Secara keseluruhan, kajian-kajian terdahulu masih terbatas dalam mengintegrasikan faktor politik, ekonomi, budaya, dan sejarah secara bersamaan dalam satu kerangka analisis komparatif yang utuh berbasis teori sistem politik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan keempat dimensi tersebut secara komprehensif menggunakan teori sistem politik David Easton sebagai kerangka analisis. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan cara kerja sistem politik secara menyeluruh melalui empat dimensi utama, yaitu *input* (tuntutan dan dukungan masyarakat), proses konversi (pengolahan tuntutan melalui lembaga-lembaga politik), *output*

(kebijakan publik yang dihasilkan), dan *feedback* (respons masyarakat yang memengaruhi siklus politik berikutnya). Kerangka ini diaplikasikan dengan memetakan bagaimana Indonesia dan Jepang mengelola keempat komponen tersebut secara komparatif, sekaligus memberikan refleksi kritis terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat relevansi teori sistem politik Easton khususnya pada komponen *input*, konversi, *output*, dan *feedback* sebagai kerangka analitis yang aplikatif untuk membandingkan sistem politik dengan karakter kelembagaan yang berbeda. Secara empiris, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas tata kelola Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan bagi upaya penguatan kelembagaan dan reformasi sistem politik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sistem politik dan pemerintahan Indonesia dan Jepang, apa saja persamaan dan perbedaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi dalam dimensi politik, ekonomi, budaya, dan sejarah, dan bagaimana refleksi terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan itu,

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara kedua sistem tersebut, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi, serta memberikan refleksi kritis terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *literature review* atau tinjauan pustaka sistematis. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan secara mendalam. Sejalan dengan itu, Moleong (2017) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan membandingkan fenomena sistem politik dan pemerintahan Indonesia dan Jepang secara mendalam berdasarkan sumber-sumber dokumentasi yang relevan. Desain *literature review* memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai temuan dari penelitian terdahulu guna membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis

terhadap topik yang dikaji (Creswell, 2014).

Pengambilan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri sumber-sumber pustaka yang diperoleh melalui basis data Google Scholar, dengan bantuan aplikasi *Publish or Perish* untuk membantu penelusuran dan seleksi sumber secara lebih sistematis. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci "perbandingan sistem politik Indonesia dan Jepang," "sistem pemerintahan presidensial dan parlementer," "demokrasi konstitusional Indonesia," "teori sistem politik David Easton," dan "efektivitas tata kelola pemerintahan." Sumber dibatasi pada publikasi dalam rentang tahun 2017–2026 untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran data. Creswell (2014) menyebutkan bahwa studi dokumen merupakan salah satu prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan analisis terhadap dokumen publik maupun privat yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai struktur dan mekanisme sistem politik, perbandingan kelembagaan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemerintahan, serta refleksi terhadap praktik demokrasi di kedua negara.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan

pendekatan analitis berbasis teori. Creswell (2014) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, proses analisis data melibatkan pengorganisasian data, pembacaan mendalam, pengkodean, pengembangan tema, dan penafsiran makna secara sistematis. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori sistem politik David Easton, yang mencakup empat komponen utama, yaitu *input* (tuntutan dan dukungan masyarakat), proses konversi (mekanisme pengolahan tuntutan melalui lembaga-lembaga politik), *output* (kebijakan publik yang dihasilkan), dan *feedback* (respons masyarakat terhadap kebijakan yang memengaruhi siklus politik berikutnya). Dalam penelitian ini, keempat komponen tersebut diterapkan secara komparatif antara Indonesia dan Jepang, mencakup perbandingan karakteristik input dari masing-masing negara berdasarkan heterogenitas masyarakat dan sistem kepartaian, efisiensi proses konversi melalui relasi antarlembaga politik, konsistensi output kebijakan yang dihasilkan, serta mekanisme feedback publik baik melalui partisipasi warga maupun saluran formal seperti pemilihan umum. Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan dan seleksi sumber, kemudian kategorisasi data berdasarkan keempat komponen teori Easton, hingga penyusunan sintesis

komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sistem politik Indonesia dan Jepang, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi dalam dimensi politik, ekonomi, budaya, dan sejarah, serta menghasilkan refleksi kritis terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

PEMBAHASAN

Perbandingan Sistem Politik dan Pemerintahan di Negara Indonesia dan Jepang

Perbandingan sistem politik Indonesia dan Jepang menunjukkan perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh dinamika historis dan praktik pemerintahan. Indonesia menganut sistem presidensial (TR 2019), di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan (Basri et al., 2024). Sistem ini berasal dari proses sejarah yang panjang, mulai dari transisi ke sistem parlementer hingga kembali ke sistem presidensial melalui Dekrit 5 Juli 1959 (Nurlia & Wawan, 2024), serta diperkuat melalui amandemen UUD 1945 pasca reformasi untuk menegaskan prinsip demokrasi serta *checks and balances* (Sutedja & Silalahi, 2025). Sebaliknya, Jepang telah mengadopsi sistem parlementer dalam sistem monarki konstitusional yang berkembang sejak Restorasi Meiji dan diperkuat setelah Perang Dunia II melalui Konstitusi 1947, yang menetapkan Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Hadi, 2025). Sistem

pemerintahan di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip dasar (Yani, 2018 dalam Nurlia & Wawan, 2024), yaitu kedaulatan rakyat, pelaksanaan pemerintahan berdasarkan konstitusi, pembagian kekuasaan. Selain itu, pemerintah memperoleh legitimasi dari pemilihan umum, dan penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah-daerah setempat.

Perbedaan juga terlihat pada hubungan antar lembaga dan stabilitas politik. Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Yasnita & Kristanto, 2025), sementara Jepang menunjukkan hubungan yang lebih terintegrasi antara eksekutif dan legislatif, yang didukung oleh dominasi partai politik dan menghasilkan stabilitas kebijakan. Meskipun demikian, keduanya memiliki persamaan sebagai negara kesatuan dengan sistem demokrasi konstitusional dan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh dinamika sejarah dan perkembangan institusional masing-masing negara.

Identifikasi Persamaan dan Perbedaan

Indonesia dan Jepang memiliki sejumlah persamaan mendasar. Dari sisi ibu kota, Indonesia berkedudukan di Jakarta dengan rencana

pemindahan ke Nusantara IKN, sementara Jepang berpusat di Tokyo. Selain itu, sistem politik Indonesia dan Jepang sama-sama berlandaskan demokrasi konstitusional yang menempatkan kedaulatan rakyat dan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Indonesia menggunakan UUD 1945 (Anwar et al., 2024), sementara Jepang berlandaskan Konstitusi 1947. Keduanya juga memiliki lembaga perwakilan DPR di Indonesia dan Diet di Jepang serta menggunakan pemilu sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan. Namun, kesamaan tersebut lebih bersifat normatif, karena dalam praktiknya terdapat perbedaan mendasar. Indonesia menerapkan sistem presidensial di mana presiden sekaligus menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan Jepang menerapkan sistem parlementer dalam kerangka monarki konstitusional, dengan kaisar sebagai simbol negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dari sisi bentuk pemerintahan, Indonesia adalah republik sementara Jepang adalah monarki konstitusional (Sabrina et al., 2024).

Perbedaan juga terlihat pada sistem kepartaian. Indonesia menganut multipartai yang bersifat kompetitif dengan fragmentasi yang tinggi (Djufri 2022; Ekawati, 2019), sedangkan Jepang menganut multipartai dengan dominasi kuat dari *Liberal Democratic Party* (LDP) yang menghasilkan stabilitas politik

jangka panjang. Dalam hal lembaga perwakilan, Indonesia menerapkan *soft bicameral* di mana kewenangan DPD lebih terbatas dibanding DPR, sementara Jepang menerapkan *strong bicameral* dengan dua kamar yang memiliki kewenangan seimbang. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hibrida yang menggabungkan hukum sipil (*civil law*), hukum adat, dan hukum agama yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (Ubaidillah et al. 2023), sedangkan Jepang berbasis *civil law* yang terstruktur dengan kodifikasi kuat yang dipengaruhi hukum Jerman dan Prancis serta pengaruh Amerika Serikat pascaperang (Trianjaya, 2024).. Terakhir, proses kebijakan di Indonesia cenderung kompromistis akibat negosiasi koalisi yang kompleks, sehingga menghasilkan inkonsistensi (Tobing & Silalahi, 2025),, sementara Jepang lebih terkoordinasi dan konsisten karena relasi eksekutif-legislatif yang harmonis.

Analisis Sistem Politik melalui Teori David Easton

Menurut teori sistem politik David Easton, sistem politik adalah mekanisme yang mengubah berbagai tuntutan (*input*) dari masyarakat menjadi kebijakan publik (*output*) melalui proses konversi di dalam lembaga-lembaga politik, serta menghasilkan umpan balik (*feedback*) yang memengaruhi

siklus politik berikutnya (Nurlia & Wawan, 2024). Pendekatan ini menyoroti bahwa efektivitas suatu sistem politik tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kemampuan sistem tersebut untuk mengelola interaksi antara masyarakat dan negara secara adaptif dan berkelanjutan (Djufri 2022). Perbandingan antara Indonesia dan Jepang dapat dianalisis dengan kerangka ini melalui input, menjalankan proses konversi, menghasilkan *output* kebijakan, serta merespons *feedback* masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, sistem politik memiliki karakteristik *input* yang sangat beragam dan kompleks, sejalan dengan tingkat heterogenitas masyarakat dan sistem multipartai yang terbuka (Siboy, 2021). Hal ini mencerminkan tingginya kapasitas *input* dalam sistem politik, sebagaimana dijelaskan oleh Easton. Namun, kompleksitas ini juga berarti bahwa proses konversi seringkali tidak efisien, karena melibatkan negosiasi dan kompromi di antara para aktor politik. Akibatnya, hasil kebijakan jarang sepenuhnya dan secara optimal mencerminkan tuntutan masyarakat. Situasi ini, menurut Easton, merupakan contoh ketidakseimbangan antara masukan dan kemampuan sistem untuk memanfaatkannya, yang dapat menyebabkan *overload*. Selain itu, mekanisme *feedback* di Indonesia cenderung bersifat

terbuka dan dinamis, sebagaimana tercermin dalam tingginya kritik publik dan partisipasi warga (Magriasti, 2019). Hal ini menunjukkan demokrasi yang dinamis, namun intensitas *feedback* tersebut juga mengindikasikan bahwa hasil kebijakan belum sepenuhnya menjawab harapan publik.

Sebaliknya, sistem politik Jepang menunjukkan sistem politik yang lebih teratur dan stabil dalam kerangka Easton. *Input* politik cenderung lebih terkonsolidasi karena dipengaruhi oleh dominasi partai politik serta budaya politik yang lebih terorganisir (Yasnita & Kristanto, 2025). Kondisi-kondisi ini mendukung proses konversi, dengan hubungan yang relatif harmonis antara cabang legislatif dan eksekutif dalam sistem parlementer. Hasil kebijakan juga cenderung lebih stabil dan berkelanjutan serta menunjukkan kemampuan sistem untuk merespons tuntutan publik secara efektif. Dalam hal *feedback*, Jepang memiliki pola yang lebih terkendali di mana tanggapan publik disaring melalui mekanisme formal, seperti pemilihan umum. Dalam perspektif Easton, hal ini adalah keseimbangan antara *input*, proses, dan *output*, yang memungkinkan sistem tetap stabil tanpa kehilangan legitimasi di mata publik.

Dengan demikian, keterkaitan antara teori Easton dan analisis empiris menunjukkan

bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Jepang terletak pada kemampuan sistem dalam mengelola siklus politik secara seimbang. Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola *input* yang tinggi sehingga memengaruhi efektivitas konversi dan kualitas *output*, sementara Jepang menunjukkan kapasitas yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan antar komponen sistem politik. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas sistem politik tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi oleh kemampuan sistem dalam mengelola hubungan antara tuntutan masyarakat, proses kebijakan, dan respons publik secara berkelanjutan.

Analisis Faktor yang memengaruhi (Politik, Ekonomi, Budaya, Sejarah) *Faktor Politik*

Faktor politik menjadi variabel utama dalam membedakan kinerja sistem pemerintahan Indonesia dan Jepang. Jepang memiliki stabilitas politik yang tinggi karena sistem parlementernya beroperasi dalam kerangka politik partai yang relatif terkonsolidasi, dan dominasi (LDP) yang memungkinkan koordinasi kebijakan antara kabinet dan parlemen berjalan efektif. Hal ini berarti arah kebijakan menjadi lebih konsisten, bahkan ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, lingkungan politik Indonesia lebih dinamis, dengan kombinasi sistem

presidensial dan sistem multipartai yang kompetitif, sehingga presiden harus membentuk koalisi besar untuk mendapatkan dukungan legislatif (Basri et al., 2024). Hal ini sering kali mengarah pada tawar-menawar jangka pendek dan kompromi elit yang menghasilkan inkonsistensi dalam kebijakan.

Secara analitis, perbedaan ini menunjukkan bahwa Jepang memiliki pemerintahan yang lebih stabil dan konsisten, sedangkan Indonesia lebih terbuka terhadap persaingan politik. Namun, keterbukaan ini belum diimbangi dengan konsolidasi kelembagaan yang kuat, sehingga membuat proses pembuatan kebijakan menjadi kurang efisien.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berperan penting dalam menentukan kapasitas negara dalam menjalankan sistem politik secara efektif. Jepang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat mampu memperkuat legitimasi politik dan efektivitas pemerintahan, didukung oleh peran aktif negara dalam industrialisasi melalui institusi seperti MITI yang mengoordinasikan strategi ekonomi jangka panjang (Nurlia & Wawan, 2024). Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengarah pembangunan yang terintegrasi. Sebaliknya, Indonesia memiliki lintasan ekonomi yang lebih

fluktuatif, dipengaruhi oleh perubahan rezim, tekanan eksternal, dan orientasi kebijakan jangka pendek. Meskipun memiliki potensi sumber daya yang besar, kapasitas kelembagaan Indonesia belum sepenuhnya mampu mendorong industrialisasi yang konsisten dan terintegrasi (Lestari, 2025).

Secara analitis, perbedaan ini berdampak pada kualitas legitimasi politik. Jepang memperoleh stabilitas melalui kemampuan menyediakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengelola tuntutan sosial akibat ketimpangan dan kompleksitas pembangunan. Dengan demikian, faktor ekonomi menunjukkan bahwa efektivitas sistem politik juga ditentukan oleh kapasitas negara dalam mengelola pembangunan secara berkelanjutan.

Faktor Budaya

Faktor budaya memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana sistem politik bekerja dalam praktik. Jepang ditopang oleh nilai disiplin, tanggung jawab kolektif, etos kerja, serta budaya malu yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap perilaku pejabat publik (Kadarmanta, 2024). Nilai-nilai ini mendorong akuntabilitas tanpa sepenuhnya bergantung pada mekanisme formal, sehingga standar etika

publik relatif tinggi (Nurimani et al., 2023). Sebaliknya, Indonesia memiliki nilai sosial seperti gotong royong dan musyawarah, namun belum sepenuhnya terlembagakan dalam praktik politik modern yang mendukung akuntabilitas. Dalam banyak kasus, politik masih dipengaruhi oleh patronase dan personalisasi kekuasaan, yang menunjukkan bahwa nilai sosial belum sepenuhnya bertransformasi menjadi etika politik publik yang efektif (Kadarmanta, 2024).

Secara analitis, perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh sistem formal, tetapi juga oleh keberhasilan melembagakan nilai budaya ke dalam praktik politik. Jepang cenderung menampilkan budaya politik yang lebih terorganisir dan institusional, sementara Indonesia lebih terbuka dan ekspresif dalam merespons kebijakan. Dengan demikian, perbedaan budaya politik kedua negara menjadi faktor penting yang memengaruhi karakter dan efektivitas sistem pemerintahan masing-masing.

Faktor Sejarah

Faktor sejarah menjadi landasan penting dalam pembentukan sistem politik Indonesia dan Jepang. Jepang mengalami transformasi besar sejak Restorasi Meiji hingga restrukturisasi pasca Perang Dunia II, yang menghasilkan sistem politik yang lebih terpusat, stabil, dan terkoordinasi (Hadi, 2025).

Konstitusi 1947 dan pelebagaan sistem parlementer mencerminkan upaya konsolidasi institusional yang berorientasi pada stabilitas dan pembangunan nasional. Sebaliknya, Indonesia memiliki lintasan sejarah yang lebih kompleks, mulai dari kolonialisme, perubahan sistem pemerintahan, hingga era Reformasi, yang menunjukkan proses pencarian bentuk politik yang dinamis (Nurlia & Wawan, 2024). Kondisi ini menghasilkan sistem yang lebih adaptif dan terbuka, tetapi juga menghadapi tantangan dalam konsistensi pelembagaan politik.

Secara kritis, faktor sejarah menegaskan bahwa perbedaan Indonesia dan Jepang tidak bisa dinilai hanya dari situasi kontemporer. Jepang hari ini adalah hasil dari konsolidasi panjang setelah krisis nasional besar. Indonesia hari ini adalah hasil dari transisi berulang yang belum seluruhnya selesai. Oleh karena itu, perbandingan keduanya harus adil: Jepang unggul dalam stabilitas karena sejarahnya mendorong konsolidasi institusional, sedangkan Indonesia lebih plural dan dinamis karena sejarahnya melahirkan struktur politik yang lebih terbuka namun sekaligus lebih kompleks.

Refleksi terhadap Indonesia

Refleksi terhadap sistem pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa secara konseptual desain kelembagaan pasca-amandemen UUD 1945 telah

mengarah pada demokrasi presidensial yang modern, dengan legitimasi kuat melalui pemilihan langsung serta distribusi kekuasaan yang mendorong mekanisme *checks and balances*. Reformasi konstitusi 1999-2002 memperkuat prinsip tersebut dan membatasi dominasi kekuasaan (Trianjaya, 2024). Namun, dalam praktiknya, efektivitas pemerintahan masih menghadapi kendala akibat ketidaksesuaian antara sistem presidensial dan sistem multipartai yang terfragmentasi (Sabrina et al., 2024). Relasi eksekutif-legislatif sering kali diwarnai kompromi politik yang pragmatis, sehingga kebijakan menjadi kurang efektif dan strategis (Wahyudin et al., 2019).

Bahkan, kebijakan seperti presidential threshold menunjukkan ambiguitas antara stabilitas dan pembatasan kompetisi politik (Idris & Wardana, 2023). Dalam perspektif komparatif, Jepang menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh konsolidasi institusi dan budaya politik yang kuat. Dengan demikian, refleksi terhadap Indonesia tidak dapat berhenti pada identifikasi kelebihan dan kelemahan semata, tetapi harus diarahkan pada upaya transformasi yang lebih substantif. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas institusional, khususnya dalam birokrasi dan partai politik. Kedua, reformasi sistem

kepartaian perlu diarahkan tidak hanya pada penyederhanaan jumlah partai, tetapi juga pada peningkatan kualitas representasi dan akuntabilitas politik. Ketiga, pembangunan budaya politik yang lebih rasional, deliberatif, dan berorientasi pada kepentingan publik menjadi faktor kunci dalam memperkuat efektivitas demokrasi.

Pada akhirnya, pelajaran yang dapat diambil dari Jepang bukanlah untuk meniru sistem parlementer secara mekanis, melainkan memahami bahwa keberhasilan suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara desain institusional dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah suatu negara. Oleh karena itu, tantangan utama Indonesia ke depan bukan lagi memilih sistem yang “ideal”, tetapi memastikan bahwa sistem yang telah dipilih mampu dioperasionalkan secara konsisten, profesional, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian komparatif ini, perbedaan efektivitas sistem politik dan pemerintahan Indonesia dan Jepang tidak semata ditentukan oleh desain kelembagaan formal, melainkan oleh kemampuan masing-masing negara dalam mengelola keseimbangan antara input, proses, output, dan feedback dalam kerangka teori

sistem politik David Easton. Indonesia unggul dalam legitimasi demokratis melalui mekanisme pemilihan langsung dan keterbukaan partisipasi politik, namun efektivitas kebijakan masih terhambat oleh fragmentasi sistem multipartai dan dinamika kompromi politik yang pragmatis. Sebaliknya, Jepang menunjukkan kapasitas sistem yang lebih seimbang, didukung oleh konsolidasi kelembagaan, dominasi partai yang stabil, serta budaya politik yang berorientasi jangka panjang, sehingga menghasilkan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang lebih baik. Faktor politik, ekonomi, budaya, dan sejarah terbukti menjadi variabel penting yang membentuk karakter dan kualitas tata kelola di kedua negara. Dengan demikian, tantangan utama Indonesia ke depan bukan terletak pada perubahan desain sistem, melainkan pada upaya transformasi substantif melalui penguatan kapasitas institusional, reformasi sistem kepartaian yang berorientasi pada akuntabilitas, serta pembangunan budaya politik yang lebih rasional dan deliberatif. Kajian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam strategi konkret penguatan kelembagaan di Indonesia dengan mempertimbangkan variabel kontekstual yang lebih spesifik, seperti desentralisasi dan kualitas birokrasi daerah..

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., Kamandani, & Oktapani, S. 2024. Perbandingan Perkembangan Konstitusi Berdasarkan Sistem Pemerintahan serta Bentuk dan Sifat Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1): 599–603. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3091>
- Ardhana, Azriel Putra, Vernandito S. R. Tampubolon, Hezkia Nalom, Muhammad Abyan, Nadhif Gilang Bhaswara, Adhito Martogi, and Nathanael Siregar. 2024. "Menilik Perbandingan Sistem Administrasi Kependudukan Antara Negara Indonesia Dengan Negara Jepang." *Media Hukum Indonesia (MHI):Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2(2):384–89.
- Basri, Abdul Rahman, Muhammad Sawir, Santrio Kamaluddin, and Rhina Pongtuluran. 2024. "Lanskap Pemerintahan: Memahami Perbedaan Dan Implikasi Sistem Presidensial, Parlemonter, Dan Semi-Presidensial." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* (1):63–73.
- Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Djufri, Darma. 2022. "Sistem Politik Dan Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Intelektiva* 3(10):88–97.
- Ekawati, E. 2019. Peta Koalisi

- Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7(2): 160-170. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2680>
- Hadi, K. 2025. Restorasi Meiji dan Kolaborasi Negara-Masyarakat dalam Kekuatan Ekonomi Politik Jepang. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 14(1): 512-526. <https://doi.org/10.37304/jispar.v14i1.17572>
- Halawa, Dedi Presli, Magdalena Susanti Telaumbanua, and Derman Buulolo. 2023. "Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia Dan Jepang." 6(1).
- Ibrahim, Anwar. 2024. "Sistem Pemilu Dan Pembentukan Koalisi Minoritas Study." 5(12):5313-25.
- Idris, Fahmi, and Dodi Jaya Wardana. 2023. "ASPEK HUKUM PRESIDENSIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA." *Unnes Law Review* 5(4):2507-16.
- Kadarmanta, R. A. 2024. Peran Budaya Organisasi Mewujudkan Produktivitas Kinerja (Implementasi di Negara Singapura, Jepang, China, Korea Selatan dan Indonesia). INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, 7(3): 394-407. <https://doi.org/10.31842/jurnalnobis.v7i3.328>
- Karisma Nurul, Aminullah. 2026. "PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK ANTARA INDONESIA DAN JEPANG DALAM MENGHADAPI BIROKRASI MODERN." *As-Sulthan: Jurnal of Education* 03(01):775-82.
- Lestari, Lina Puji. 2025. "Studi Komparatif Kebijakan Pemerintah Jepang Dan Indonesia Dalam Ekonomi Dan Industrialisasi." *Jurnal Kajian Hubungan Internasional* 4(1):1-14.
- Magriasti, Lince. 2019. "Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah : Analisis Dengan Teori Sistem David Easton." *LAB-ANE FISIP Untirta* : 978-602-(1):252-58.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurimani Nissa, Putri Wahyuningsih, Dinda Yusti. 2023. "Perbandingan Budaya Politik Negara Indonesia Jepang Dalam Membangun Nilai-Nilai Anti Korupsi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(5):393-401.
- Nurlia, E., & Wawan. 2024. *Perbandingan Politik Pemerintahan*. Serang: Untirta Press.
- Pelu, Handika E.A., Raymond P.

- Fenetiruma, Jaya S. Sinaga, Yosman L. Silubun, Alputila, Marlyn J. 2022. "PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang)." *Jurnal Cahaya Keadilan* 10(1):22-35.
- Sabrina, Rahma Dea, Timbul Dompok, Etika Khairina. 2024. "Perbandingan Penerapan E-Government Negara Indonesia Dan Jepang." 33-40.
- Sabrina, Revalina Aulia, Michaelia Alriviany Putri, Silvia Devi Meitasari, Sri Ayu Endang Setyoningrum, Ari Metalin Ika Puspita. 2024. "Analisis Perbedaan : Mengungkap Kesan Dan Analisis Strategis Terhadap Sistem Negara Indonesia Dan Jepang." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(5):97-105.
- Sutedja, Anthony, and Wilma Silalahi. 2025. "Hasil Perbandingan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Dengan Hasil Perubahan Setelah Amandemen." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3(2):120-26.
- Taufik, Muhammad. 2020. "DINAMIKA DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER DI INDONESIA." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1(2):127-41.
- Tobing, D. R. L., & Silalahi, W. 2025. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Asli dan Setelah Amandemen: Implikasi terhadap Pembagian Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2): 159-169.
<https://doi.org/10.70292/pc.hukumsosial.v3i2.151>
- Trianjaya, M. I. 2024. Penerapan Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia: Tantangan dalam Dinamika Politik Kontemporer. *EL-SIYASA: Journal of Constitutional Law*, 2(1): 29-38.
<https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v2i1.013>
- TR, Muhammad Ridha. 2019. "MENARIK BANDUL KEKUASAAN KE TITIK EQUILIBRIUM: POPULISME SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG BAGI SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3(1):39-47.
- Ubaidillah, M. Bahtiar, Irwan Swandana, Titik Khusumawati, and Derta Nur Anita. 2023. "Nilai-Nilai Spiritualitas Dalam Pancasila: Sebuah Tinjauan Teoritis." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7(1).
- Wahyudin, Fikri, Riva Aryani

- Purwana, and Syifa Masrihah.
2019. "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1(2).
- Yasnita, Y., & Kristanto, B. 2025. Perbandingan Sistem Pemerintahan, Konstitusi dan Sistem Kepegawaian Negara Indonesia dan Jepang. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(3): 4299-4306. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i3.48452>